

**PENERAPAN ELEKTRONIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (E-PAD)  
DALAM MENINJAU PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UPT BPKD  
WILAYAH CIHAURBEUTI**

**Fauziyah Latiefa Salsabila<sup>1</sup>, Edwin Hadiyan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>IAILM Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

<sup>1</sup>fauziyah.latiefa22sps@mhs.uinjkt.ac.id, <sup>2</sup>edwinhadiyan.ip@gmail.com

**Abstract**

*The research aims to determine the application of the government accounting information system (electronic local revenue application/e-Pad) to the review of regional tax revenue at the UPT BPKD Ciheurbeuti Region. The research method use in this research is the qualitative method. The data sources used in this research are primary data and secondary data, then using field study and library research data collection techniques. This research also uses validity and data analysis using Cresweel's theory, which has six steps in its analysis. The results of the research show that the UPT BPKD Office has imolemented an electronic application for local original income (E-Pad) with the benefits of a system for knowing the list of taxpayers, registering new taxpayers, determining taxes for taxpayers, registering tax bills for taxpayers, track record of taxpayer deposits, and also provide convenience to taxpayers in Ciamis-Cihaurbeuti Regency. However, in its implementation there are still several concerns that must be addressed.*

**Keywords:** *Accounting Informaton System, e-Pad, Local Tax Revenue*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pemerintahan (aplikasi elektronik Pendapatan Asli Daerah/e-PAD) terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan validitas dan analisis data menggunakan teori milik Cresweel, yang mana memiliki enam langkah dalam analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti telah mengimplementasikan aplikasi elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD) dengan manfaat sistem mengetahui daftar wajib pajak, mendaftarkan wajib pajak baru, penetapan pajak bagi wajib pajak, pencatatan tagihan pajak bagi wajib pajak, rekam jejak penyeteroran wajib pajak, serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak di Ciamis Wilayah Cihaurbeuti.

# Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

Namun, dalam implementasinya e-PAD ini masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diatasi.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, e-Pad, Penerimaan Pajak Daerah

## A. Pendahuluan

Pemerintah daerah diwakili oleh kepala daerah yang merupakan tokoh penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang kemudian menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>1</sup> Peran pemerintah daerah adalah menjaga, memfasilitasi, memberdayakan, dan memajukan masyarakat.<sup>2</sup> Sementara itu, pemerintahan daerah sendiri merupakan perwujudan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, serta menjaga kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>3</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat dua fungsi dalam pemerintahan, yaitu: *Pertama*, urusan pemerintahan yang bersifat wajib yaitu suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah. *Kedua*, urusan pemerintahan pilihan, yang dilaksanakan oleh suatu daerah sesuai dengan potensi khasnya.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004<sup>5</sup>, menguraikan perlunya cara-cara kreatif dalam membiayai pemerintah daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sistem informasi akuntansi merupakan salah satu pendekatan yang dianggap dapat membantu pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2009).

<sup>2</sup> Mohamad Guntoro, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah," *CENDEKIA Jaya* 3, no. 2 (July 31, 2021): 1-9, <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

<sup>4</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah" (MK RI, 2004).

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah dan UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

memberikan pelayanan yang terbaik.<sup>6</sup> Kumpulan atau integrasi subsistem dan komponen fisik dan non fisik yang saling terhubung dan berfungsi dengan baik untuk mengubah data transaksional yang berkaitan dengan urusan keuangan menjadi informasi keuangan dikenal dengan sistem informasi akuntansi.<sup>7</sup> Penelitian ini mengkaji system pemungutan pajak yang tadinya menggunakan system manual, dialihkan ke sistem dengan e-PAD, hal ini dilakukan untuk bisa secara cepat mengawasi dan mengoptimalkan pemungutan pajak di daerah.

Setiap daerah mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengawasi dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri.<sup>8</sup> Berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan keuangan daerahnya. Mereka juga harus mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang diterima daerah, maka kebutuhan dalam peningkatan PAD pun akan semakin besar.<sup>9</sup>

Eksplorasi potensi sumber pendapatan dalam batasan peraturan dan perundang-undangan yang relevan adalah hal yang sangat penting. Hal ini termasuk mendalami pajak dan retribusi daerah yang telah lama menjadi elemen penting dalam PAD.<sup>10</sup> Adapun komponen PAD, meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pendapatan pajak daerah, retribusi daerah,

---

<sup>6</sup> Ludi Wishnu Wardana and Yuli Agustina, "Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 3, no. 1 (January 16, 2018): 65–84, <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.334>.

<sup>7</sup> Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012).

<sup>8</sup> Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (December 29, 2020): 99–115, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

<sup>9</sup> Ika Lasnawati, Wiwin Arifin, and Ade Nahdiatul Hasanah, "Analisis Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan* 2, no. 2 (October 2, 2023): 137–47, <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1402>.

<sup>10</sup> Zainuddin Rahman, "Regional Original Income and Special Allocation Funds on Economic Development," *Advances in Economics & Financial Studies* 1, no. 1 (January 26, 2021): 1–13, <https://doi.org/10.60079/aefts.v1i1.14>.

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah dan UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

dll; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, sumber daya alam, alokasi umum, dan alokasi khusus.<sup>11</sup>

Pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dituntut untuk lebih mementingkan kemandirian keuangan agar dapat menyelenggarakan dan membiayai urusan pemerintahan daerahnya secara efektif.<sup>12</sup> Sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperlancar proses pembangunan di wilayah Cihaurbeuti sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian, pemerintahan Kabupaten Ciamis yang didalamnya terdapat wilayah Cihaurbeuti mengadopsi sistem yang dikenal dengan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-Pad). Aplikasi ini berfungsi sebagai alat untuk memudahkan layanan keuangan dalam pengumpulan, evaluasi, dan pelaporan masalah keuangan.<sup>13</sup> Wilayah Cihaurbeuti adalah daerah yang langsung berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, daerah ini terkenal wilayah yang dinamis dengan banyaknya UMKM. Dengan adanya e-PAD ini bisa melihat bagaimana perkembangan UMKM dan pengembangan usahanya.

Kehadiran skema e-PAD untuk menata usaha pajak daerah yang mulai dioperasikan oleh Kantor BPKD yang dinilai sangat penting dalam menrotong efektivitas dan efisiensi penatausahaan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang tidak dapat diabaikan peranannya dalam meningkatkan perekonomian daerah.<sup>14</sup> Pemerintah daerah akan memiliki sumber kekayaan yang melimpah, berkat tingginya pendapatan pajak dan retribusi. Sumber daya keuangan ini akan

---

<sup>11</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017).

<sup>12</sup> Yoyo Sudaryo, Sevyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017).

<sup>13</sup> Beny Prasetyo, Fahrobby Adnan, and Randika Andi Syahputra, "Evaluasi Kualitas Layanan Electronic Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) Di Kabupaten Banyuwangi Menggunakan Metode E-GovQual Dan Importance Performance Analysis," *Jurnal Tekno Kompak* 16, no. 1 (February 17, 2022): 83, <https://doi.org/10.33365/jtk.v16i1.1857>.

<sup>14</sup> Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah dan UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

ditujukan untuk mendanai serangkaian inisiatif dan upaya pembangunan yang inovatif, semuanya dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Admini & Novianti dalam penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa penerapan aplikasi sistem elektronik pendapatan asli daerah (e-Pad) ini memiliki tujuan utama yaitu memberikan kemudahan kepada wajib pajak, meningkatkan standar pelayanan publik, berfungsi sebagai arsip data digital dan tanpa kertas, serta menjadi landasan perumusan kebijakan pengambilan keputusan.<sup>16</sup> Penelitian lain yang dilakukan Firmansyah & Sumanto mendapatkan bahwa e-Pad dinilai cukup terpuji dan dirasakan cukup membantu, tetapi kenyatannya masih banyak oknum yang enggan memanfaatkannya. Kemudian, dijelaskan pula harapan dalam peningkatan jumlah pengguna aplikasi. Karena pada dasarnya aplikasi tersebut masih terdapat kendala yang harus diatasi, yang kemudian akan berdampak pada pihak terkait.<sup>17</sup> Penelitian Beny Prasetyo, Fahrobby Adnan dan Randika Andi Syahputra, pendapatan Asli Daerah (E-PAD) yang berbasis website beralamatkan <https://layanan.banyuwangikab.go.id>. Layanan E-PAD merupakan sebuah inovasi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. E-PAD merupakan layanan yang dapat membantu dalam menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam melaporkan dan membayar pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian ini menggunakan metode e-GovQual yang bertujuan untuk

---

<sup>15</sup> Arisa Arispen, Dewi Rahmi, and Ade Yunita Mafruhah, "Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (October 26, 2021): 75-81, <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>.

<sup>16</sup> Khorin Deviana Admini and Nurlita Novianti, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Pad (Elektronik-Pendapatan Asli Daerah) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi," *JIM FEB*, 2020.

<sup>17</sup> Riza Firmansyah and Agus Sumanto, "Evaluasi Penerapan Pajak Daerah Online Menggunakan Aplikasi E-PAD Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan* 1, no. 7 (July 30, 2021): 686-96, <https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p686-696>.

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

mengetahui sejauh mana kualitas dari layanan E-PAD yang diterima oleh pengguna, dan metode IPA untuk mengukur kinerja layanan berdasarkan tingkat kepentingan layanan E-PAD. Hasil dari evaluasi tersebut akan diketahui bagaimana kualitas layanan yang diberikan dan atribut apa saja yang perlu mendapat rekomendasi perbaikan berdasarkan skala prioritasnya. Dengan demikian hasil dari evaluasi dan rekomendasi perbaikan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan layanan E-PAD kedepannya kepada pihak penyedia layanan.<sup>18</sup>

Dengan berbagai dasar dan latar belakang di atas, maka penelitian ini penting dilakukan yang bertujuan untuk melihat implementasi aplikasi tersebut pada kantor lain. Lebih lanjut, judul penelitian ini adalah “Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti”.

### B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti”, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sumber utama data, khususnya data yang diperoleh langsung oleh peneliti (atau petugasnya) muncul sebagai sumber data primer.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer adalah pegawai atau *staff* bagian keuangan di Kantor UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti.

---

<sup>18</sup> Beny Prasetyo, Fahrobby Adnan dan Randika Andi Syahputra, Evaluasi Kualitas Layanan Electronic Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) Di Kabupaten Banyuwangi Menggunakan Metode E-GovQual dan IPA, Jurnal Tekno Kompak, 2022.

<sup>19</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasar fenomena yang mendalam. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>20</sup> Uma Sekaran and Roger Bougie, *Research Methods for Business A Skill-Building Approach*, Seventh Edition (United Kingdom: John Wiley & Sons, 2016).

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah dan UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

2. Data pendukung disebut juga data sekunder yang pada hakikatnya adalah data yang dikumpulkan sebagai data tambahan. Dapat digambarkan sebagai data yang disajikan dalam bentuk catatan tertulis.<sup>21</sup> Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang didapat dari buku, jurnal, aplikasi e-PAD, dan sumber lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan adalah upaya sistematis yang melibatkan perolehan data secara teliti di lingkungan aktual yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Peneliti memilih metode wawancara (*Interview*) sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Lebih khusus, memerlukan pertukaran tanya jawab secara verbal antara dua atau lebih individu yang hadir secara fisik. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara dengan sumber primer.

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Menurut Creswell dan Miller, validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.<sup>23</sup> Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif.<sup>24</sup> Menurut Creswell (2010) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini: 1. Mengelolah data dan, menginterpretasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi. 2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh. 3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Koding merupakan proses mengelolah materi atau informasi menjadi

---

<sup>21</sup> Sekaran and Bougie.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

<sup>23</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 286

<sup>24</sup> *ibid*

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. 4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. 6. Menginterpretasi atau memaknai data. Beberapa langkah dalam analisa data kualitatif di atas, akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang didapat ditulis dalam transkrip wawancara, lalu dikoding, dipilih tema-tema sebagai hasil temuan, dan selanjutnya dilakukan interpretasi data.

Selain itu, dalam ranah eksplorasi penelitian kepustakaan (*library research*), peneliti akan melakukan upaya untuk mengumpulkan sampai menilai informasi yang diperoleh dalam bentuk jurnal, aplikasi e-PAD dan sumber lainnya. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh banyak teori dan data yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>25</sup> Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono analisis data adalah proses pemeriksaan yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>26</sup> Analisis data melibatkan pengorganisasian informasi ke dalam kategori berbeda, deskripsi data dalam unit ringkas, sintesis data, dan perumusan kesimpulan. Miles menjelaskan terdapat 3 langkah pengolahan data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>27</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD) merupakan suatu inovasi yang membantu Pemerintahan Kabupaten Ciamis yang diciptakan oleh PT. Usadi Sistemindo Intermatika Bandung yang memiliki fungsi untuk pemutakhiran data yang tidak berbayar secara berkala dan terus menerus, hal tersebut sangat penting karena sangat membantu dalam pengelolaan

---

<sup>25</sup> Arikunto.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

<sup>27</sup> Matthew B Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, 3rd ed. (United State of America: Sage, 2014).



**Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau  
Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti**

pendapatan asli daerah. Sistem ini didukung dengan beberapa teknologi, yaitu: 1) Aplikasi berbasis web. 2) *Windows server* 2008 atau lebih baru. 3) *Database microsoft SQL server* 2008, dan 4) *Internet explorer* 7 atau lebih terbaru.

Fitur yang diberikan oleh PT. Usadi Sistemindo Intermatika Bandung, yaitu dimulai dari: 1) Menu pendaftaran, 2) Menu pendataan dan penetapan, 3) Menu pembayaran dan penagihan, 4) Menu setoran badan/dinas, dan 5) Menu pelaporan. Untuk data terakhir yang tertera pada aplikasi elektronik pendapatan asli daerah (e-Pad) UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Kantor UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

Keterangan	Jumlah
Jumlah NPWPD Baru	24
NPWPD Aktif	544
Pendataan yang belum ditetapkan	584
1. Hotel Melati	1
2. Pemakaian K. Daerah	438
3. Reklame Billboard	135
4. Reklame Berjalan	1
5. Reklame Kain	4
6. Katering	5
SKPD Jatuh Tempo yang belum dilunasi	1.705
1. Air tanah	519
2. Batu kapur	1
3. Bea perolehan	4
4. Kantin	76
5. Katering	159
6. Parkir	19
7. Pasir	1
8. Pertandingan olahraga	6
9. Restoran	2
10. Rumah makan	31

**Sumber:** UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

Dalam aplikasi elektronik pendapatan asli daerah (e-PAD) tertera beberapa fitur, antara lain: *Pertama*, SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai adalah fitur pertama untuk melakukan pendataan, pembayaran, dan izin reklame. SKP ini terbagi kedalam dua pembagi, yaitu: a) SKP untuk Office Assesment (yang penetapan pajaknya ditentukan oleh Dinas), dan b) SKP untuk *Self Assesment* (yang penetapan pajaknya ditentukan oleh pribadi). *Kedua*, SPTP adalah surat menyurat yang digunakan warga negara untuk mengetahui perhitungan atau penyetoran kewajiban fiskal, baik yang berkaitan dengan bidang kena pajak maupun bidang tidak kena pajak. Dalam fitur ini terdapat beberapa point, yaitu pendataan, validasi, cetak SPTP, pembayaran, dan teguran jika ada wajib pajak yang tidak membayar.

*Ketiga*, Laporan. Untuk fitur laporan terdapat empat kegunaan, yaitu: daftar induk (yakni daftar-daftar wajib pajak), buku WP/WR, buku register (untuk daftar), dan daftar penetapan (digunakan untuk melihat list daftar penetapan pajak tiap wajib pajak. *Keempat*, Setoran. Dalam fitur ini kita bisa melihat setoran pendapata, rekap penerimaan tiap bulan, buku kas umum, dan realisasi pendapatan. *Kelima*, Security. Untuk security ini berfungsi untuk user aplikasi yang misalnya lupa password. Security ini memudahkan user untuk mendapatkan bantuan agar kebutuhannya bisa terealisasikan. *Keenam*, NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah. Dalam fitur NPWPD ini masyarakat dengan dibantu *staff*/pegawai kantor BPKD akan bisa mendapatkan NPWPD.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pemerintahan Kabupaten Ciamis harus memungut pajak, dengan jenis pajak daerah sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adapun daftar penerimaan pajak

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

daerah UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti pada bulan Juni 2023 antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.** Daftar Penerimaan Pajak Daerah Juni 2023

Jenis Pungutan	Penerimaan
Pajak Restoran	Rp. 5.757.119
Pajak Rumah Makan	Rp. 45. 443.000
Pajak Kantin	Rp. 165.000
Pajak Katering	Rp. 12.626.190
Pajak Café	Rp. -
Pajak Balap Kendaraan Bermotor	Rp. -
Pajak Permainan Ketangkasan	Rp. 277.200
Pajak Pertandingan Olahraga	Rp. 505.000
Pajak Reklame Billboard	Rp. 12.603.700
Pajak Reklame Kain	Rp.1.892.667
Pajak Reklame Melekat	Rp. -
Pajak Parkir	Rp. 2.140.400
Pajak Air Tanah	Rp. 1.373.773
Pajak Sarang Burung Walet	Rp. -
Pendapatan Denda	Rp. 115.240
Jumlah	Rp. 82.668.809

**Sumber:** UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

**Tabel 2.** di atas memperlihatkan jumlah penerimaan pajak daerah per Juni 2023 di Kantor UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti. Pencatatan penerimaan tersebut sudah menggunakan bantuan e-Pad, penerapan sistem ini menjadi sebuah solusi untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pencatatan. Dengan sistem ini, diharapkan pengelolaan data dan laporan menjadi lebih akurat dan transparan, serta dapat meminimalisir potensi terjadinya praktik korupsi. Namun, meskipun sudah ada regulasi mengenai penerapan sistem e-Pad, implementasinya masih sangat terbatas dan belum terlaksana secara optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor teknis dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dalam mengoperasikan sistem e-Pad

## **Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti**

tersebut. Adapun dari hasil wawancara dengan Bapak Ate, bahwasanya ada lima kekurangan dari penerapan sistem ini, antara lain:

1. Masih banyak masyarakat belum mengerti sistem tersebut.
2. Masyarakat belum sadar atas pajak.
3. Kurangnya pembinaan terhadap pembayaran pajak.
4. Masih ada penyimpangan uang (masih minimnya controlling sistem e-Pad).
5. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari dinas keuangan atau pemerintahan atau pelaksana yang mengerti betul tentang sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD). Bagaimana e-PAD ini bisa dirapkan dan dibunakan sebagai sistem untuk mengawasi dan melakukan sistem administrasi yang akuran dalam pelaporan data pajak.

### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) UPT Kabupaten Ciamis sudah melakukan penerapan aplikasi elektronik pendapatan asli daerah (E-Pad). Kemudian sistem tersebut membantu kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk mengetahui daftar wajib pajak, pendaftaran wajib pajak baru, penetapan pajak untuk wajib pajak, daftar tagihan pajak untuk jawib pajak, *track record* setoran wajib pajak, dan lain sebagainya. Sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD) juga memberikan kemudahan kepada wajib pajak di Kabupaten Ciamis. Tetapi dalam penerapannya masih ada beberapa *concern* yang harus dibenahi karena masih banyak masyarakat Kabupaten Ciamis yang masih belum sadar atas pajak, masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sistem tersebut, masih kurangnya pembinaan terhadap pembayaran pajak, masih adanya penyimpangan dalam penerimaan, dan juga masih kurangnya sumber daya manusia dari perusahaan/entitas yang mengerti betul tentang sistem ini.

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, ada saran yang harus menjadi perhatian sesama:

1. Melaksanakan penyuluhan atau pembekalan lebih lanjut kepada masyarakat Kabupaten Ciamis agar masyarakat lebih melek terhadap pembayaran pajak.
2. Membenahi sumber daya manusia (SDM) dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) agar tidak terjadi lagi penyimpangan uang. Bisa dilaksanakan pengetatan controlling system.
3. Untuk peneliti selanjutnya, bisa menggunakan metode lain atau fokus lain agar masalah-masalah yang ada bisa teratasi.
4. Bisa dilaksanakannya penelitian lanjutan di daerah yang sama atau daerah lain agar bisa dikomparasikan mengenai penerapan sistem elektronik pendapatan asli daerah (e-Pad) di daerahnya.

### Daftar Pustaka

- Admini, Khorin Deviana, and Nurlita Novianti. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Pad (Elektronik-Pendapatan Asli Daerah) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi." *JIM FEB*, 2020.
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Arispen, Arisa, Dewi Rahmi, and Ade Yunita Mafruhah. "Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (October 26, 2021): 75–81. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>.
- Creswell John W., *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 286
- Firmansyah, Riza, and Agus Sumanto. "Evaluasi Penerapan Pajak Daerah Online Menggunakan Aplikasi E-PAD Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan* 1, no. 7 (July 30, 2021): 686–96. <https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p686-696>.

## Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti

- Guntoro, Mohamad. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah." *CENDEKIA Jaya* 3, no. 2 (July 31, 2021): 1-9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (December 29, 2020): 99-115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." MK RI, 2004.
- Lasnawati, Ika, Wiwin Arifin, and Ade Nahdiatul Hasanah. "Analisis Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan* 2, no. 2 (October 2, 2023): 137-47. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1402>.
- Miles, Matthew B, Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. 3rd ed. United State of America: Sage, 2014.
- Nurcholis, Hanif. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Prasetyo, Beny, Fahrobby Adnan, and Randika Andi Syahputra. "Evaluasi Kualitas Layanan Electronic Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) Di Kabupaten Banyuwangi Menggunakan Metode E-GovQual Dan Importance Performance Analysis." *Jurnal Tekno Kompak* 16, no. 1 (February 17, 2022): 83. <https://doi.org/10.33365/jtk.v16i1.1857>.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rahman, Zainuddin. "Regional Original Income and Special Allocation Funds on Economic Development." *Advances in Economics & Financial Studies* 1, no. 1 (January 26, 2021): 1-13. <https://doi.org/10.60079/aefs.v1i1.14>.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. *Research Methods for Business A Skill-Building Approach*. Seventh Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons, 2016.
- Sudaryo, Yoyo, Sevyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Sutabri, Tata. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

**Penerapan Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dalam Meninjau  
Penerimaan Pajak Daerah pada UPT BPKD Wilayah Cihaurbeuti**

Wardana, Ludi Wishnu, and Yuli Agustina. "Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 3, no. 1 (January 16, 2018): 65-84. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.334>.